

Larangan Anggota Parpol Jabat Ketua RT dan RW Dipertanyakan

BATAM, PM: Anggota DPRD Kota Batam yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Batam, Udin P Sihaloho meminta penjelasan kepada Pemerintah Kota Batam, terkait larangan anggota partai politik (Parpol)



menduduki jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 24 Tahun 2017.

"Izin pimpinan, saya Udin P Sihaloho dari PDIP ingin meminta penjelasan kepada Wali Kota Batam, terkait larangan anggota parpol menjabat ketua RT

atau ketua RW," ungkap Udin di sela-sela Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Ranperda PKL, Senin (26/2).

Lebih lanjut ditanyakan Sekretaris Komisi IV DPRD Batam ini, apa yang menjadi dasar Wali Kota Batam mengeluarkan Perwako tersebut. Sementara diketahui, selama ini banyak anggota parpol menjabat sebagai ketua RT dan RW.

"Saya minta ada penjelasan, karena ini menjadi keresahan saya, dan juga rekan saya Safari Ramadhan yang saat ini duduk sebagai ketua RW," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Perwako tersebut bisa menimbulkan keresahan dan polemik di tengah-tengah masyarakat. Apalagi saat ini memasuki tahun politik. Sementara di sisi lain ada anggota parpol tertentu bisa menduduki posisi ketua RT/RW.

Menurutnya, salah satu pasal di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007, tidak mengatur adanya larangan anggota parpol menjabat sebagai ketua RT dan RW.

"Mengacu pada Permendagri Nomor 5 tahun 2007, tidak ada larangan itu. Karenanya kita minta

penjelasan Wali Kota Batam dalam paripurna mendatang," imbau anggota DPRD dari Dapil Bengkong-Batuampar ini.

Menjawab pertanyaan wartawan, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan tidak ada persoalan selama ini, mungkin kebetulan di tempat Udin P Sihaloho yang terjadi masalah.

"Nanti saya cek di bagian hukum kita, ada berapa ribu RT dan RW di Batam ini, sampai hari ini saya belum dapat laporan ada persoalan," tegas Amsakar saat ditemui di lobi DPRD Batam usai Paripurna. (abg)

Guntur Sakti Jadi Kabiro